

Media dan Komunikasi Politik

Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik

Pengantar:

Dr. Heri Budiarto, M.Si

Editor :

Didik Haryadi Santoso,

Media dan Komunikasi Politik
(Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik)
@Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
340 hal (x + 330 hal), 16 cm x 24 cm
ISBN: 978-602-52470-7-1

Penulis :

Ahmad Junaidi, Eko Hari Susanto, Riris Loisa, Cut Alma Nuraflah,
Ade Muana Husniati, Vani Dias Adiprabwo, Budhi Widi Astuti,
Ponco Budi Sulisty, Muhammad Tabri, Diana Gustinawati, Choirul Fajri,
Siti Mawadati, Anton Yudhana, M. Nastain, Martriana PS., Fitria Angeliqa,
Eko Harry Susanto, Yuniar, Ageng Rara Cindoswari, Rivga Agusta,
Dwi Pela Agustina, Fajar Dwi Putra, Safrudiningsih, Sarkawi, Supadiyanto,
Hamida Syari Harahap, Zulhefi, Heri Budianto, Achmad Oddy Widyantoro,
Rosalia Prismarini Nurdiarti, Gregorius Genep Sukendro,
Didik Haryadi Santoso, Rani Dwi Lestari.

Pengantar:

Dr. Heri Budianto, M.Si

Editor :

Didik Haryadi Santoso,

Perancang Sampul :

Achmad Oddy Widyantoro

Penata Letak :

Ibnu T. W

Cetakan Pertama, 2018

Diterbitkan oleh:

Mbridge Press
Jl. Ringroad Utara, Condong Catur, Depok,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Lab. Multipurpose, Lantai 2 Kampus III UMBY
Hp. 081324607360

KATA PENGANTAR

Dr. Heri Budiarto, S.Sos., M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Ketua Umum ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi)

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNYA, dua buku yang berjudul: Relasi Negara, Industri dan Masyarakat dalam Perspektif Komunikasi serta Media dan Komunikasi Politik (Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik). Buku ini ditulis oleh akademisi, peneliti dan praktisi di bidang Ilmu Komunikasi yang ikut serta dalam acara Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi (KNK) yang dilaksanakan oleh PUSKOMLIT Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multi Media (FIKOMM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Batam Kepulauan Riau.

Kegiatan ini merupakan kegiatan konferensi yang ketiga yang digelar oleh PUSKOMLIT FIKOMM UMBY, sebelumnya tahun 2016 Konferensi Internasional di Yogyakarta, dan tahun 2017 Konferensi Nasional di Pontianak. Kegiatan semacam ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi ilmu komunikasi untuk mempresentasikan karya penelitian maupun kajian pustaka dalam forum ilmiah. Serta hasil dari itu ditampilkan dan dibuat menjadi Buku Proseeding, sebagai bahan bacaan dan literature di bidang ilmu Komunikasi.

Di tahun ke 3 ini, tema yang diambil adalah Komunikasi dan Pendidikan Politik Menuju Demokrasi Yang Berkualitas. Hal ini tentu berasal bahwa tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik dimana saat masa kampanye pemilihan umum 2019. Sebagai satu institusi pendidikan, tentunya bertanggungjawab dalam memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat terkait dengan isu-isu politik yang telah diteliti dan ditelaah oleh berbagai akademisi, peneliti dan praktisi ilmu komunikasi.

Minat kajian terkait komunikasi politik, demokrasi, media politik, serta pendidikan politik dalam lingkup ilmu komunikasi saat ini semakin tinggi peminatnya. Tentu ini adalah hal yang menggembirakan, mengingat literatur yang terkait dengan hal tersebut masih terbatas. Tingginya animo

ini, tentu merupakan hal positif ketika realitas politik ditampilkan dan disajikan dari perspektif ilmu komunikasi.

Tidak itu saja, relasi politik dan komunikasi bukan hal yang kebetulan namun jauh sebelum itu, bahwa ahli politik telah mengilhami lahirnya ilmu komunikasi serti Laswell. Fakta lain menunjukkan bahwa dalam realitas politik, ilmu komunikasi mampu menterjemahkan berbagai persoalan politik yang meliputi komunikator politik, pesan politik, media dan saluran politik, khalayak politik, dan efek dari proses komunikasi politik.

Apalagi di Indonesia saat ini, sejak reformasi 1998 mengalami perkembangan Demokrasi yang begitu pesat dan terbuka. Bukan hanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tapi pemilihan kepala daerah, dan perubahan perubahan sistem pemilu mendorong kajian kajian ilmu komunikasi semakin terbuka.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu literature yang dapat digunakan oleh siapapun yang ingin melihat berbagai persoalan politik dari kacamata ilmu komunikasi. Kami berharap, semoga buku ini bermanfaat, dan kepada seluruh penulis kami ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam kegiatan kami dan semoga karya bapak/ibu/saudara dapat menjadi penebar kebaikan dalam kerumitan politik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua...

Yogyakarta, 14 Nopember 2018

KATA PENGANTAR EDITOR

Didik Haryadi Santoso, M.A

Dewan Editor & Ketua Konferensi Nasional Komunikasi 2018

Assalamualaikum Warrahmatullahiwabarakatuh

Dunia politik tidak pernah habis untuk dibahas dan dikaji. Berbagai problematika kerap muncul karena faktor politik. Politik menjadi pembahasan yang penting, tidak hanya di kalangan profesional, melainkan juga dikalangan akademisi, termasuk akademisi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi menjadi alat sekaligus jembatan dalam proses-proses politik. Jika ditelusuri lebih jauh, benturan dan sinergisitas ilmu politik dan ilmu komunikasi kian hari kian hangat, terutama pada saat menjelang atau memasuki tahun-tahun politik.

Dunia komunikasi dan media misalnya, turut hadir mewarnai kontestasi pemilihan baik di tingkat daerah maupun provinsi. Mewarnai disini dapat saja dalam banyak arti, mewarnai dalam versi sebagai jembatan dan pelengkap, atau dapat pula mewarnai ikut “bermain” dalam dunia politik. Mulai dari produksi wacana, pertarungan pemberitaan hingga “perang terbuka” antar media. Riu rendah ini menarik untuk diteliti lebih jauh mengingat dunia komunikasi dan politik turut berkembang pesat, terutama kehadiran new media atau media baru

New media dengan ragam kemampuannya mampu merubah banyak dimensi komunikasi dan proses politik. Mulai dari interaksi, produksi konten, distribusi hingga konsumsi konten-konten politik. Sebagai teknologi dan medium, ia netral. Aktor atau penggunalah yang akan menentukan plus minus, negatif dan positifnya. Kemampuan new media yang dapat memangkas ruang dan waktu, menjadi keunikan tersendiri. Memiliki kecepatan, meskipun secara akurasi masih rendah khususnya soal-soal pemberitaan. Terlebih mengenai pemberitaan-pemberitaan politik di tahun politik.

Dunia politik dimediasi ulang dalam ruang-ruang virtual. Dalam terminologi David Bolter dikenal istilah remediation, saat dimana realitas empirik dimediasi ulang oleh teknologi hingga melahirkan sebuah realitas baru, sebuah realitas politik dalam ruang virtual. Realitas empirik bergeser menjadi realitas virtual, identitas empirik berubah bentuk menjadi identitas virtual. Identitas tidak lagi berbentuk kesatuan melainkan

bergeser menjadi liquid identity, sebuah identitas yang cair sebagaimana yang diutarakan oleh Antony Giddens.

Remediasi digital melalui media dan new media mengantarkan kita pada perubahan-perubahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, termasuk di bidang politik. Perubahan itu tidak hanya tentang bagaimana perubahan perilaku aktor politik, melainkan juga meliputi konten, audien atau konstituen, hingga pola-pola interaksi yang terjadi didalamnya. Cara aktor politik, audien pemilih dalam berkomunikasi juga berubah dari face to face communication bergeser pada tipe komunikasi yang termediasi. Pertarungan isu dan wacana pun tidak dapat dihindarkan. Hingga pada akhirnya, tidak sedikit yang menimbulkan ragam persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini berupaya membaca ragam problematika yang berkaitan dengan komunikasi politik, media dan masyarakat secara lebih luas, terutama persoalan-persoalan yang terjadi belakangan ini dan saat menjelang pemilihan presiden dan atau pemilihan kepala daerah. Melalui buku ini, para penulis tidak hanya mengeksplorasi problematika komunikasi politik secara gamblang melainkan juga berupaya memberikan catatan-catatan kritis dan reflektif atas permasalahan yang belakangan ini terjadi. Buku ini dapat dijadikan referensi, tidak hanya bagi para mahasiswa atau akademisi melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk para aktor politik, serta masyarakat luas secara umum yang tertarik dengan telaah-telaah mengenai komunikasi politik pada new media. Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan lmu pengetahuan khususnya mengenai new media dan komunikasi politik. Akhir kata, Selamat hari pahlawan dan selamat membaca!

Wassalamualaikum Warrahmatullahiwabarakatuh

Yogyakarta, 10 November 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Dr. Heri Budianto, S.Sos., M.Si.....	iii
KATA PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI	vii

‘CEBONG-KAMPRET’, NEW MEDIA DAN KUALITAS DEMOKRASI KITA

<i>Ahmad Junaidi, Eko Hari Susanto, Riris Loisa</i>	1
---	---

AKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK KANDIDAT PRESIDEN MELALUI PERSONAL BRANDING

<i>Cut Alma Nuraflah dan Ade Muana Husniati</i>	19
---	----

MEMBANGUN KOMUNIKASI POLITIK POSITIF DALAM LAYAR (Studi Kasus Citra Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Youtube Tahun 2004-2014)

<i>Vani Dias Adiprabwo.....</i>	35
---------------------------------	----

PENGUNAAN RUANG PUBLIK TERMEDIASI DALAM PILGUB JATENG 2018 (Studi Kasus Program “Panggung *Civil Society*” Radio Idola 92.6 FM Semarang)

<i>Budhi Widi Astuti</i>	57
--------------------------------	----

REMAJA DAN MEDIA SOSIAL: STUDI RESEPSI PESAN-PESAN POLITIK JELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DKI JAKARTA TAHUN 2017

<i>Ponco Budi Sulisty.....</i>	75
--------------------------------	----

ANALISIS PEMBERITAAN BUPATI TERPILIH 2017-2022 BENGKULU TENGAH PADA SURAT KABAR HARIAN RAKYAT BENGKULU

<i>Muhamad Tabri dan Diana Gustinawati.....</i>	93
---	----

ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA DALAM KONFLIK PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT

<i>Choirul Fajri, Siti Mawadati, Anton Yudhana.....</i>	109
---	-----

ANALISIS TEKS JARGON PKS (Critical Discourse Analysis Teks Jargon “Cinta Kerja dan Harmoni”)

<i>M. Nastain</i>	119
-------------------------	-----

ANALISIS WACANA KESETARAAN PEREMPUAN OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi pada Akun <i>Endorser Pria</i> dalam Kampanye <i>Kita Setara</i> di Instagram)	
<i>Martriana PS. dan Fitria Angeliqa</i>	133
MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN PUBLIK DAN KINERJA BADAN PUBLIK	
<i>Eko Harry Susanto</i>	149
PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI	
<i>Yuniar dan Ageng Rara Cindoswari</i>	161
PILIHAN RASIONAL AKTOR DALAM KONTROVERSI VIDEO KLIP KAMPANYE ‘INDONESIA BANGKIT’ AHMAD DHANI	
<i>Rivga Agusta dan Dwi Pela Agustina</i>	185
A-SIMETRIS POLITIK (Studi Deskriptif tentang Komukasi Krisis dan Konflik Pemilihan Lurah di Desa Ngestiharjo Yogyakarta Melalui Arisan)	
<i>Fajar Dwi Putra</i>	199
MEREDAM KECENDRONGAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA MELALUI KOMUNIKASI PEMIMPIN-MASYARAKAT	
<i>Safrudiningsih</i>	209
PENGARUH <i>MONEY POLITIC</i> TERHADAP SIKAP MASYARAKAT DESA KARANG TINGGI PADA PILKADA BENGKULU TENGAH 2017 (Penelitian di Desa Karang Tinggi Kecamatan Talang Empat)	
<i>Sarkawi</i>	227
REFLEKSI 20 TAHUN ORDE REFORMASI: MENKRITISI GERAKAN REFORMASI DAN MANAJEMEN ANTIKORUPSI	
<i>Supadiyanto</i>	239
POLA KOMUNIKASI PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Studi kasus Lurah Perempuan di Wilayah Malabar Bandung)	
<i>Hamida Syari Harahap</i>	269
KOMUNIKASI PEMASARAN POLITIK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA PEMILU 2014	
<i>Zulhefi dan Heri Budianto</i>	287

PESAN POLITIK DALAM BINGKAI KOMUNIKASI VISUAL (Perancangan <i>Visual Campaign</i> Pilpres 2019 Bijak Memilih, Politik Aman dan Damai)	
<i>Achmad Oddy Widyantoro dan Rosalia Prismarini Nurdiarti</i>	303
KOMUNIKASI POLITIK, MENYIMAK SIRKUS KOMUNIKASI	
<i>Gregorius Genep Sukendro</i>	317
SELF PLAGIARISM PADA PEMBERITAAN POLITIK DI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF ETIKA JURNALISTIK	
<i>Didik Haryadi Santoso dan Rani Dwi Lestari</i>	325

ANALISIS TEKS JARGON PKS (Critical Discourse Analysis Teks Jargon “Cinta Kerja dan Harmoni”)

M. Nastain, S.Sos.I, M.Ikom

Universitas Mercu Buana Yogyakarta
(nastain@mercubuana_yogya.ac.id)

Pendahuluan

Latar Belakang

Kemunculan Partai Keadilan Sejahtera dalam kancah politik Indonesia disambut dengan penuh suka cita oleh kalangan aktivis Islam. Mereka menemukan oase politik atas sikap represif Orde Baru yang mengkebiri hak-hak politik mereka karena sensifitas isu kepemimpinan Islam. Berbanding terbalik, sebagian kalangan menilai kehadiran PKS sebagai sebuah ancaman mengingat tujuan besar mereka disinyalir akan membentuk daulah Islamiyah. Meskipun kekhawatiran tersebut sampai hari ini belum terbukti. Bahkan PKS sebagai sebuah partai menunjukkan konsistensi dan militansi dari kadernya dan terbukti mampu menduduki beberapa posisi penting dalam pemerintahan.

Kemapanan partai-partai nasionalis dihentak dengan kekuatan massa militan PKS. Bukan sekedar membangkitkan euforia partai Islam yang lama tenggelam dengan tumbangnya Masyumi, kehadiran PKS juga menghadirkan ancaman tersendiri bagi partai-partai nasionalis. Jumlah kursi yang dimiliki PKS di DPR menempatkannya pada posisi signifikan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah¹.

Ditengah kontroversi yang melekat pada jati dirinya, PKS telah memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam merubah mata angin perpolitikan Indonesia. Sorotan terhadap PKS tidak terlepas dari kemampuan partai dalam konsolidasi massa, menjaga soliditas internal dan daya tarik persuasi massa dengan mengedepankan militansi kader dalam pelayanan publik.

Soliditas mesin partai dalam bekerja tidak terlepas dari strategi-strategi yang dimainkan oleh elite ditingkat atas. Salah satu strategi konsolidasi internal dan persuasi massa yang dilakukan oleh PKS

¹ Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi pasca Orde Baru*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 65-72

adalah dengan meluncurkan *tagline* atau jargon politik setiap menjelang pemilihan umum. “Cinta , Kerja, Harmoni” merupakan jargon yang diusung menjelang Pilpres 2014. Jargon tersebut sebagai ideologi dan visi misi PKS dalam upaya persuasi massa.

Dikatakan oleh Chesterd Banard dalam karyanya *The Functions of The Executive* bahwa cara-cara mengkomunikasikan tujuan komunitas atau kelompok akan menjadi pembahasan yang mendalam terkait dengan struktur, keluasan cakupan lingkungan komunitas dan teknik-teknik komunikasi².

Mengutip pendapat dari Alfredo Pareto ketika berbincang mengenai agenda perubahan oleh kaum marjinal (proletar) bahwa perubahan tidak akan mungkin dapat diwujudkan kecuali adanya campur tangan dari kaum intelektual yang mampu menjadikan agenda perubahan seolah menjadi agenda massa. Kekuatan revolusioner tidak dimiliki oleh massa yang nonrasional, mereka akan selamanya dalam kungkungan kekuasaan kepentingan elite selama kapasitas rasional massa tidak ditingkatkan³.

Proses doktrinasi jargon yang massif dan kontinyu serta *incremental* sebagai karakter persuasi jargon telah mampu menyusupkan dan merubah cara pandang individu bahwa agenda perubahan partai adalah mewakili agenda perubahan setiap elemen individu partai. Jargon politik yang diproduksi dengan sengaja oleh elite partai tentu memiliki tujuan tertentu sebagai sebuah pesan politik baik secara internal maupun eksternal. Sejarah telah mencatat jargon “Cinta, Kerja dan Harmoni” diproduksi setelah tsunami politik menimpa PKS dengan tertangkapnya beberapa petinggi partai dalam kasus korupsi. Situasi itulah yang memaksa elite PKS memproduksi ulang jargonnya, mengingat jargon yang lama seolah sudah tidak relevan lagi.

Jargon sebagai sebuah pesan politik sarat akan pesan-pesan politik yang karakteristiknya “manis” untuk dilihat tetapi “pahit” ketika dirasakan dalam tataran aplikasinya. Karena produksi jargon yang seharusnya menjadi turunan visi misi besar partai terkadang hanya diproduksi untuk pembentukan citra partai. Menurut pemikir kritis Jean Baudrillard citra memiliki empat bentuk yaitu, pertama, representasi dimana citra merupakan cerminan realita. Kedua, ideologi dimana citra menyembunyikan dan memberikan gambaran yang salah akan realita. Ketiga, citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas. Keempat, citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun⁴.

² Joseph A. Devito, *Human Communication*, Profesional Books, Jakarta, 1997, h. 337

³ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 54

⁴ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan*, (Jakarta, Pustaka Indonesia, 2013), h. 14

Penelitian ini akan menelisik tentang makna teks jargon “Cinta, Kerja dan Harmoni” dalam perspektif kritis dengan menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis Fairclough. Akan tetapi penelitian ini hanya membatasi sampai pada tahapan pertama dari tiga tahap metode Critical Discourse Analysis Fairclough yakni analisis teks.

Kajian Pustaka

1. Politik

Menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggotanya⁵. Setiap sarjana politik memiliki beragam definisi terkait politik dari yang bersifat kritis sampai pragmatis. Konsep yang paling populer konsep politik adalah permasalahan menyangkut Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*) dan distribusi kekuasaan (*distribution*).

Dalam konsep negara demokrasi perebutan kekuasaan dilakukan dengan sistem pemilihan umum lima tahunan sekali. Aspirasi politik disalurkan melalui partai politik sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan negara. Menurut Carl J. Friederich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materiil⁶.

Masyarakat yang luas dan kompleks memerlukan saluran komunikasi politik yang beragam sesuai dengan ideology dan kecenderungan kepentingannya sehingga dalam demokrasi memungkinkan lahirnya beragam partai politik sebagai representasi ideology dan kepentingan. Dalam hal ini partai politik menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik bagi masyarakat sebagai implementasi keikutsertaan dalam pengelolaan negara. Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik dalam upaya mencerdaskan segenap anak bangsa terutama dalam bidang politik. Masyarakat yang sadar politik tidak akan mudah dimanfaatkan oleh elite untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Bahkan negara memberikan anggaran melalui partai untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi konstituen. Menurut M. Rush

⁵ Rod Hague et al, *Comparative Government and Politics*, (London, McMillian Press, 1998)

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 404

dalam karyanya *An Introduction to Political Sociology* memaparkan bahwa sosialisasi politik berperan dalam memperkenalkan sistem politik dan bernegara kepada konstituen yang dalam prosesnya akan memantik persepsi dan reaksi terhadap fenomena politik.

2. Teks dan Intertekstualitas

Dalam argumentasinya tentang kekuasaan Foucault menterjemahkan bahwa kekuasaan bukanlah milik melainkan praktik, ia bukanlah sesuatu yang memaksa melalui kekuatan fisik tetapi sesuatu yang hadir dengan relasi sosial dan wacana. Kekuasaan teraktualisasi dengan lembut dalam produksi teks-teks politik dan jargon-jargon politik dalam setiap komunitas tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera.

Relasi sosial kata Max Schulmann, bagi produsen teks dengan audiens adalah berguna untuk menyingkap sebuah kebenaran⁷. Karena setiap teks yang diproduksi akan membentuk makna tertentu. Adanya ideologi dalam setiap teks yang diproduksi adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Volosinov yang dikutip oleh Sobur, "*Wherever a sign is present, ideology is present too. Everything ideological processes a semiotic value*"⁸. Dalam produksi jargon-jargon politik secara tidak langsung dan tidak tampak adanya sebuah frasa yang menunjukkan sebuah kekuasaan yang tersembunyi. Menyergap, menyandera dan menggiring setiap anggota komunitas untuk berperilaku guna mencapai tujuan yang diselipkan dalam jargon.

Pada hakikatnya teks tidak pernah berdiri sendiri. Teks mendapatkan pengaruh dari pihak lain baik dalam pembicaraan maupun dalam tulisan sebelumnya. Disini kata-kata lain dievaluasi, diasimilasi, disuarakan dan diekspresikan kembali dengan bentuk lain. Intertekstualitas adalah sumber dimana kita bisa menemukan ambivalensi dalam teks. Jika teks utama ditentuka atau didasari oleh teks lain yang datang lebih dahulu yang masuk dalam komposisi, elemen dari teks utama, bisa jadi tidak jelas ditempatkan dalam relasi dengan jaringan intertekstualitas dan maknanya bisa jadi ambivalen. Teks atau wacana bersifat dialogis. Produsen teks pada dasarnya tidak sedang berbicara dengan dirinya sendiri melainkan sedang menyuarakan dirinya sendiri.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Dari tiga level yang diperkenalkan oleh Fairclough penelitian ini dibatasi hanya menggunakan

⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LKIS, 2012),h. 42

⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung : Rosdakarya, 2006),h. 4

analysis teks atau level satu saja. analisis tekstual akan membahas terkait dengan makna tekstual dan makna intertekstual setiap kata dalam jargon PKS “Cinta, Kerja dan Harmoni”. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis bertujuan membongkar ideologi yang tersirat mengiringi teks. Dalam pandangan-pandangan Horkheimer ilmuwan kritis dari mazhab Frankfurt School seperti dikutip Eriyanto⁹, teori kritis harus memberi kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat yang tidak rasional. Konsentrasi dan analisis paradigma kritis adalah menemukan kekuatan yang mendominasi dalam teks dan menghegemoni anggotanya atau kelompok marjinal yang lain.

I. Analisis Intertekstualitas Teks Jargon Politik PKS (Cinta Kerja Harmoni)

Serangkaian peristiwa yang mengawal perjalanan politik PKS pasca pemilu 2009 sampai hari ini memaksa DPP PKS memproduksi jargon baru dalam menghadapi pemilu 2014. Identitas bersih dan peduli yang selama satu dekade melekat pada citra PKS sudah mulai goyah akibat berbagai macam isu korupsi yang menerpa beberapa anggota dewan PKS.

Dari 45 orang wakil PKS di DPR beberapa anggota dewan disebutkan terkait skandal korupsi. Diawali oleh Misbakhun yang terjebak kasus kredit fiktif Bank Century. Meskipun perkembangan kasusnya terindikasi banyak kepentingan politik, dan terbukti pada akhirnya Misbakhun dapat membuktikan bahwa kasusnya tidak lebih dari keberaniannya membongkar kasus century yang melibatkan partai penguasa, citra PKS sebagai partai dakwah yang bersih dan peduli terlanjur tercemar.

Kasus yang membuat PKS seakan menghadapi “turbulensi politik” adalah ditangkapnya Presiden PKS yang ke empat Luthfi Hasan Ishaq yang disinyalir terlibat dalam kasus pengaturan kuota sapi impor di kementerian pertanian yang dipimpin oleh kader PKS Suswono. Penangkapan Luthfi adalah sebuah tamparan keras bagi PKS, partai yang selama ini menjaga citra bersih dan membentuk opini publik sebagai partai dakwah dan partai Islam harus tercoreng dengan tertangkapnya pucuk pimpinan partai..

Bukan hanya Luthfi sebagai mantan presiden PKS yang digiring KPK, melainkan beberapa petinggi PKS juga terpaksa harus menaiki anak tangga KPK meski sekedar untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syuro PKS juga terseret-seret beserta putranya Ridwan. Begitupun dengan Suswono dan Anis Matta yang mesti merelakan berbagai jadwal dengan KPK disela kesibukan menjadi menteri dan safari keliling Indonesia untuk konsolidasi kader.

⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LKIS, 2012),h. 23

Matriks 1
Makna Tekstual Cinta

Kata	Makna
Cinta	<ul style="list-style-type: none"> • Suka sekali • Sayang benar • Kasih sekali • Terpikat • Ingin sekali • Berharap sekali , Rindu

Dengan berbagai macam peristiwa yang mengiringi PKS dalam rentang pasca 2009, PKS memproduksi jargon politik baru untuk menghadapi pemilu 2014 yaitu Cinta, Kerja, Harmoni. Cinta secara tekstual memiliki makna suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali dan rindu¹⁰. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lain disebutkan makna cinta adalah perasaan sayang sekali, susah hati, risau, cemas (terhadap sesuatu)¹¹.

Matriks 2
Makna Intertekstual Cinta

Kata	Makna
Cinta	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik terhadap politik kekerasan • Kritik terhadap politik <i>black campaign</i> • Kritik terhadap politik <i>Character Assasination</i> • Politik santun dan beretika

Cinta dalam keterkaitan dengan politik menyiratkan perlunya kasih sayang dalam percaturan politik. Ada sebuah proses melibatkan hati dan perasaan sebagai manusia bukan sekedar berbicara tentang kekuasaan sebagaimana dikemukakan Dahl dan Althoff¹². Berpolitik dengan cinta, berpolitik dengan kasih sayang, berpolitik dengan melibatkan hati dan sisi kemanusiaan, berpolitik tanpa mengesampingkan norma dan budaya Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

Akan tetapi Dan Nimmo memaparkan dan menegaskan pendapat Bell bahwa politik adalah pembicaraan, pembicaraan mengenai pengaruh dan otoritas dan menambahkan pemikirannya bahwa politik adalah

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 215

¹¹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta : Aneka Ilmu, 2008), h. 217

¹² Anwar Arifin, Politik Pencitraan, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013, h. 6

pembicaraan mengenai konflik dalam perspektif kekuasaan¹³. Senada dengan Nimmo, Hilmi Amuniddin menegaskan dalam Rapimnas DPP PKS di Semarang tanggal 18 April 2013 bahwa partai politik (dalam hal ini adalah PKS) harus mempunyai daya tahan yang tinggi dalam menghadapi konspirasi, fitnah, pelecehan dan “dagelan” politik¹⁴. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa PKS mengakui dan sadar bahwa konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari politik. Butuh kesiapan ekstra, keahlian khusus layaknya prajurit di garis depan yang tidak boleh lengah.

Konsep cinta yang diproduksi oleh DPP PKS sebagai jargon politik terkini seakan sebagai reaksi dari berbagai macam kasus dan peristiwa yang mengguncang stabilitas politik PKS. Anis Matta mencoba mengkonstruksi bahwa semua peristiwa yang menghantam PKS adalah bagian dari konspirasi politik yang memang di desain untuk menyerang dan menghancurkan PKS. Sebuah sikap *excuse* dan mencoba mencari pembenaran dari kesalahan yang dilakukan. Meskipun belum terbukti dalam persidangan tipikor kesalahan yang tampak adalah minimal kesalahan dalam membentengi kekuatan politik dari ancaman pihak luar. Seperti dikemukakan oleh Arief Munandar dalam desertasinya bahwa karakteristik yang sering muncul dalam diri kader jamaah tarbiyah adalah kecenderungan menciptakan alasan, sulit menerima kekurangan dan cenderung mencari pembenaran atas kekurangan¹⁵.

PKS seperti sudah kehilangan kepercayaan diri mengusung jargon bersih dan peduli. Dalam iklim persaingan politik, entitas yang bersaing harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bersaing untuk mendapatkan konsumen politik (massa). Untuk memenangkan persaingan politik partai harus mampu memenuhi kebutuhan politik massa. Produk-produk politik yang dibutuhkan massa adalah program kerja, kebersihan track record partai, ideologi dan program kerja. Produk politik juga mesti berorientasi pasar, menurut Gatignon dan Xuereb orientasi pasar bermakna memperhatikan konsumen, pesaing dan perubahan teknologi¹⁶. Jargon bersih dan peduli jelas gagal dalam orientasi pasar jika terus digunakan mengingat pemberitaan media baik cetak maupun elektronik yang terus menerus memberitakan kasus impor daging sapi.

¹³ Ibid, h. 7-8

¹⁴ Bidang Arsip Dan Sejarah DPP PKS, Cinta Kerja Harmoni, Jakarta : Bidang Arsip dan Sejarah, 2013, h.15

¹⁵ Arief Munandar, Antara Jemaah dan Partai Politik ; Dinamika habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004, Depok: UI, 2011. h, 371

¹⁶ Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2006, h. 160

Konsep cinta yang diusung oleh PKS tidak lebih sebagai *apologist content* (*reactif apologist content*) atau konsep yang diproduksi sebagai upaya untuk membela diri atau mempertahankan pendirian. Reaktif adalah karena merupakan tindakan atau respon atas serangan pihak lain. Citra atau *image* adalah identitas politik, karena *image* adalah visualisasi dari atribut yang dipersiapkan oleh massa¹⁷. Jargon cinta digunakan sebagai alat yang mengkritik sistem politik Indonesia yang cenderung “kasar” padahal dalam sudut pandang yang berbeda dapat dimaknai ini adalah ketidaksiagaan, ketidaksiagaan dan lemahnya proteksi identitas yang dimiliki oleh PKS atas trik dan intrik politik lawan. *Apologist content* mungkin efektif secara internal karena kesamaan bangunan visi misi tetapi kurang efektif secara eksternal. Justru dapat menimbulkan *resistensi politik*.

Apologist Content terlihat dalam pidato Hilmi Aminuddin dalam taujih (pengarahan) Rapimnas DPP PKS di Semarang. Hilmi menuturkan bahwa turbulensi politik yang dialami oleh PKS adalah sebuah sistem yang memang dirancang oleh Allah sebagai upaya untuk menyingkirkan kotoran yang masih menempel di tubuh PKS. *Hizzah* (goncangan) adalah diksi yang dipilih untuk menggambarkan rentetan peristiwa politik yang menghantam PKS, baik itu *hazzan ma'nawiyah* (goncangan moral) maupun *hazzan fikriyah* (goncangan pemikiran) . Goncangan politik ini dinilai sebagai bentuk cinta Allah pada perjalanan politik PKS yang menguji kerapuhan dan soliditas *shaff* (barisan) nya¹⁸. *Reaktif apologist content* ini sangat efektif dalam menjaga soliditas kader secara internal tetapi menuai *resistensi politik* secara eksternal.

Matriks 3
Makna Tekstual Kerja

Kata	Makna
Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan melakukan sesuatu • Yang diperbuat • Sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah • Mata pencaharian

Pilihan kata kedua jargon politik PKS menjelang 2014 adalah kerja. Secara tekstual makna kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang diperbuat,

¹⁷ Ibid, h. 253

¹⁸ Bidang Arsip Dan Sejarah DPP PKS, Cinta Kerja Harmoni, Jakarta : Bidang Arsip dan Sejarah,2013, h.7-26

sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian¹⁹. Tahun 2014 adalah tahun kerja politik bagi PKS dan menjadi salah satu tahun terberat. PKS harus bekerja keras untuk menjaga dan mengembalikan reputasinya yang luluh lantah karena skandal korupsi kuota daging impor. Mereka harus kembali membangun dan merebut simpati publik (simpatisan, *swing vote* yang merupakan tipologi pemilih gampang berubah atau dikategorikan oleh Dan Nimmo sebagai pemilih responsif²⁰.

Matriks 4
Makna Intertekstual Kerja

Kata	Makna
Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Berkarya • Produktif • Performa • Optimisme • Semangat • Otokritik dan evaluasi bagi elite politik

Konsep kerja juga seperti hanya menjadi positioning politik bagi PKS. Yakni seluruh aktivitas kerja untuk menanamkan kembali kesan di benak massa yang sempat hilang. Konsep kerja keras diteruskan dari struktur elite kepada struktur massa (ranting) dengan menggunakan pendekatan –pendekatan syariat dan dalil. Dalam sambutannya Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Amunuddin sempat menyitir ayat alquran yang menjelaskan tentang keharusan setiap ummat untuk bekerja dan berkarya²¹.

Menjadi sangat dilematis jika kader diminta bekerja hanya karena merupakan kewajiban sedangkan mereka tidak merasakan dampak nyata dari kinerja mereka. Fetisisme atau jurang realita ekonomi antara elite dan massa menjadi pemandangan yang sangat miris. Mereka yang berdarah-darah dilapangan belum merasakan dampak nyata buah perjuangan baik dari sisi kesejahteraan maupun nilai sosial. Jika porsinya demikian maka massa atau kader tidak lebih dari massa yang dimobilisir untuk kepentingan elit. Saatnya dipertanyakan bagaimana partai membalas kinerja kader atau massa?

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 554

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Aneka Ilmu, 2008), h. 458

²⁰ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik (filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. H, 223-224

²¹ Bidang Arsip Dan Sejarah DPP PKS, *Cinta Kerja Harmoni*, Jakarta : Bidang Arsip dan Sejarah, 2013, h.31

Konsep kerja termasuk kategori *performative apologist content* dimana konsep yang diusung tidak sekedar bersikap pembelaan membabitnya tapi juga ditindak lanjuti dengan aksi nyata berupa kerja keras. Terbukti DPP PKS tidak menyurutkan target perolehan 3 besar pemilu 2014 seperti yang dicanangkan semenjak Luthfi belum tertangkap. Optimisme DPP PKS akan diuji dengan soliditas kader yang secara grafik performa sudah menurun (perbandingan pemilu 2004 dan 2009). Ditambah dengan kasus-kasus korupsi yang menimpa kader utama PKS, dibutuhkan kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan dan semangat kader seperti sedia kala. Ibarat kapal yang terus laju bergerak ditengah samudera tanpa tepi, lambung kapal PKS ini mengalami kebocoran karena tertabrak karang. Pilihan mereka harus terus melaju diambil memperbaiki lambung kapal yang berlubang. Jika berhenti sekedar untuk memperbaiki mereka akan kehilangan banyak waktu sebelum sampai tujuan. Jika mereka terus melaju tanpa memperbaiki, karam adalah resiko yang menghadang. Dibutuhkan nahkoda yang handal untuk membimbing laju kapal PKS. Nahkoda yang tidak hanya mengetahui bagaimana segera sampai tujuan tetapi juga mampu mengatur tempo laju kapal yang disesuaikan dengan perbaikan lambung yang koyak, mampu memberi semangat terhadap awak yang bekerja sesuai dengan kebutuhan tiap awak kapal.

Berdasarkan temuan dalam penelitian Arief disinyalir bahwa konsep kerja merupakan otokritik bagi pimpinan dan segenap jajaran elite PKS yang mengemban amanah ditingkat dewan pusat dan daerah agar mengoptimalkan daya kerja²². Kritik internal berlaku menyoroti kinerja politik yang dianggap gagal dalam memanfaatkan peluang-peluang politik karena kinerja yang kurang optimal. Lemahnya komunikasi politik secara vertikal struktural maupun secara horizontal dengan partai lain.

Turbulensi politik begitu kuat terasa menghantam sendi-sendi politik PKS. Hantaman yang bertubi-tubi dari media maupun lawan politiknya membuat presiden PKS kelima Anis Matta harus road show ke seluruh penjuru Indonesia untuk konsolidasi. Sebagai peredam situasi dan *defense strategy* PKS memproduksi jargon “harmoni”.

²² Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik ; Dinamika habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Depok: UI, 2011. h,374-375

Matriks 5
Makna Tekstual Harmoni

Kata	Makna
Harmoni	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatukan kelompok dalam masyarakat (integrasi) • Kemampuan mengekspresikan pikiran orang lain secara jernih (artikulasi) • Bersinonim dengan keindahan rupa dan gerak • Tidak ada friksi • Pernyataan rasa • Aksi, gagasan, minat • Keselarasan, Keserasian

Dalam kamus Mirriam-Webster Dictionary harmoni diartikan menyatukan kelompok-kelompok dalam masyarakat (integrasi), kemampuan mengekspresikan pikiran orang lain secara jelas (artikulasi) atau bersinonim pula dengan keindahan rupa atau gerakan, hal yang penting atau serius, dan integritas. Jadi hakikatnya harmoni adalah tiadanya friksi dalam perbedaan, munculnya persatuan dalam perbedaan, dan hadirnya keinginan yang baik (*goodwill*). Ia adalah kesepakatan bersama, hidup berdampingan secara damai, kesatuan dan persatuan²³.

Makna harmoni secara tekstual dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian (harus ada antara irama dan gerak²⁴. Harmoni menunjukkan sebuah situasi yang saling menjaga, selaras, asri. Dalam hubungan yang saling menghargai, menghormati. Tidak ada friksi dalam perbedaan, berdampingan dengan damai, memiliki rasa kesatuan dan persaudaraan yang utuh.

Harmoni politik berbicara tentang bagaimana partai politik yang berkompetisi mampu menjaga etika (*fatsun*) politik, menghargai proses politik yang tidak sekedar berorientasi pada hasil. Partai politik dalam bingkai harmonis mampu memiliki kesiagaan mental atau emosional, memiliki kedekatan hubungan, kedekatan dalam kebersamaan dan konsistensi mencapai arah tujuan.

²³ <http://www.pksnongsa.org/2013/04/membedah-tagline-cinta-kerja-dan.html>. diakses pada 27 Oktober 2013

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 390

Matriks 6
Makna Intertekstualitas Harmoni

Kata	Makna
Harmoni	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga etika politik • Menghargai proses politik • Saling menghargai dalam kebhinekaan • Saling menghormati dalam perbedaan politik • Adanya keselarsan dalam keberagaman

Harmoni dimaknai oleh DPP PKS sebagai upaya yang menghadirkan keselarasan dalam keberagaman. Politik yang mengakomodasi seluruh perbedaan budaya daerah, suku, agama dan ras menjadi persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan. Tidak ada friksi dalam perbedaan karena semuanya memiliki tujuan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Harmoni adalah fitrah dari *sunnatullah* yang bekerja di alam raya dengan penuh keseimbangan. Semuanya berjalan sesuai dengan posisi dan tugas masing-masing. Harmoni menjadi *tools of change* yang menghasilkan budaya politik santun, saling menghargai.

Diksi harmoni dipilih DPP PKS terindikasi sebagai perbaikan internal karena adanya friksi dalam menata partai kedepan. Perjalanan partai PKS ditengarai terjadi friksi antara kubu yang menamakan faksi keadilan dan faksi sejahtera. Faksionalisasi dalam tubuh PKS ditegaskan oleh pengamat politik UGM Ari Dwipayana yang menyatakan bahwa faksi keadilan adalah faksi yang berbasis ideologi sedangkan faksi sejahtera adalah faksi pragmatis yang lebih memilih untuk tetap pada barisan pemerintah karena memiliki akses ekonomi²⁵.

Pandangan sedikit berbeda dipaparkan oleh peneliti Universitas Indonesia yang konsen dengan PKS Arief Munandar mengatakan bahwa terjadi faksionalisasi tetapi bukan faksionalisasi yang kaku. Faksionalisasi berlangsung secara dinamis dan tidak terlalu rigid seperti yang dibayangkan oleh pihak eksternal. Faksi keadilan adalah gerakan religius (*religious movement oriented*) sedangkan faksi sejahtera adalah faksi yang berorientasi pada partai politik (*political party oriented*)²⁶. Terpilihnya Anis Matta sebagai presiden kelima menunjukkan bahwa faksi sejahtera lebih mendominasi dalam tubuh PKS.

²⁵ <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/13053/pengamat-ugm-ari-dwipayana-kubu-keadilan-versus-kubu-kesejahteraan-di-pks-saling-bertarung>. diakses pada 27 Oktober 2013

²⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/078460236/Benarkah-Ada-Kubu-Keadilan-dan-Sejahtera-di-PKS>. diakses pada 27 Oktober 2013.

Faksionalisasi menunjukkan pergeseran *political mind* dikalangan elite PKS. Mereka yang dulu hadir dengan label dakwah, dengan label penegakan syariat, dengan label santri kampus sedikit terusik dengan ujian kemewahan. Wakil anggota dewan dari PKS sudah tidak segan tampil dengan perlengkapan mewah. Bukan tidak boleh tetapi budaya kita menyukai kesederhanaan.

Konsep harmoni juga memberi kritik pada budaya politik Indonesia yang cenderung anarkis dengan merebaknya budaya *black campaign*, *character assassination*, *money politic* dan cara-cara instant untuk mendapatkan kekuasaan. Harmoni mengajarkan cara-cara yang santun, etis, melibatkan rasa dan emosi sehingga kemenangan politik adalah kemenangan yang tidak merendahkan lawan. Kemenangan politik adalah permulaan penataan posisi politik yang saling mendukung demi kepentingan bangsa bukan saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi dan golongan.

Tetapi konsep harmoni dalam jargon politik PKS dapat dianalisis sebagai *specific knowledge* untuk membungkus kegagalan pertahanan politik PKS. Ketika PKS mengatakan bahwa kasus yang melibatkan Luthfi adalah skenario, rekayasa atau konspirasi secara tidak langsung PKS menunjuk diri sendiri bahwa partai gagal mengamankan diri dari serangan lawan politik. Partai tidak melakukan langkah antisipatif dan protektif terhadap gangguan aset-aset yang berhubungan dengan reputasi partai. Seringkali kegagalan tersebut justru ditindak lanjuti dengan upaya-upaya reaktif yang justru menuai hasil kontraproduktif.

Kesimpulan

Jargon yang diproduksi oleh partai politik selalu memiliki pandangan ideologis dan sarat dengan kepentingan. Produksi teks tidak dapat dipisahkan dari penanaman kepentingan baik yang bersifat kritis ideologis maupun pragmatis oportunistis. Partai politik dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera berusaha menggerakkan kader (konstituen) dengan melakukan komunikasi politik menggunakan jargon atau tagline. Mereka berupaya memberikan pemahaman bahwa partai bergerak dengan landasan Cinta, Kerja dan Harmoni.

Produksi Teks dengan segala kepentingannya dirasa mampu meyakinkan kader bahwa elite partai menjalankan politik sesuai dengan peta besarnya. meskipun dalam analisis teks dan intertekstualitas makna jargon tidak sesederhana sebagaimana yang dipahami oleh kader dan konstituen.

Referensi

- Arief Munandar, Arief, *Antara Jemaah dan Partai Politik ; Dinamika habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Depok: UI, 2011
- Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik (filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Arifin, Anwar, *Politik Pencitraan*, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2013
- Bidang Arsip Dan Sejarah DPP PKS, *Cinta Kerja Harmoni*, Jakarta : Bidang Arsip dan Sejarah, 2013
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Devito, Joseph. A, *Human Communication*, Profesional Books, Jakarta, 1997
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis teks media*, Yogyakarta: LKIS, 2012
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Aneka Ilmu, 2008
- Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2006
- Hague, Rod et al, *Comparative Government and Politics*, London, McMillian Press, 1998
- Maridjan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Ritzer, Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2011
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media*, Bandung : Rosdakarya, 2006

Web

- <http://www.pksnongsa.org/2013/04/membedah-tagline-cinta-kerja-dan.html>.
- <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/13053/pengamat-ugm-ari-dwipayana-kubu-keadilan-versus-kubu-kesejahteraan-di-pks-saling-bertarung>
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/078460236/Benarkah-Ada-Kubu-Keadilan-dan-Sejahtera-di-PKS>.